

1-3-2022

Pengaruh Kesetaraan Gender terhadap Ketimpangan Capaian Pendidikan di Indonesia Tahun 2015–2019

Aninditya Yuniar

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow, aninditya.yuniar@bps.go.id

Aisyah Fitri Yuniasih

Politeknik Statistika STIS, aisyah.fy@bps.go.id

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jepi>



Part of the [Education Economics Commons](#)

Recommended Citation

Yuniar, Aninditya and Yuniasih, Aisyah Fitri (2022) "Pengaruh Kesetaraan Gender terhadap Ketimpangan Capaian Pendidikan di Indonesia Tahun 2015–2019," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*: Vol. 22: No. 1, Article 7.

DOI: 10.21002/jepi.2022.07

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jepi/vol22/iss1/7>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Economics & Business at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Pengaruh Kesetaraan Gender terhadap Ketimpangan Capaian Pendidikan di Indonesia Tahun 2015–2019

The Impact of Gender Equality on Education Inequality in Indonesia in 2015–2019

Aninditya Yuniar^{a,*}, & Aisyah Fitri Yuniasih^b

^aBadan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow

^bPoliteknik Statistika STIS

[diterima: 3 September 2020 — disetujui: 20 Desember 2020 — terbit daring: 3 Januari 2022]

Abstract

Education is one of the most fundamental of human capital. The right to education is written in UUD 1945 and policy of compulsory education has already been implemented, yet the mean years of schooling in Indonesia is still low. It is assumed that there is education inequality. Method of analysis used in this research is panel data regression model FEM with FGLS–SUR. The research finds that education inequality in Indonesia is classified as low inequality in the past 5 years and is effected significantly by gender equality, government budget, unemployment rate, and Gini ratio.

Keywords: education inequality; Gini coefficient of education; gender equality; FEM FGLS–SUR

Abstrak

Pendidikan merupakan salah satu modal manusia yang sangat mendasar. Hak untuk memperoleh pendidikan diatur dalam UUD 1945 dan program wajib belajar sudah digalakkan pemerintah namun nyatanya rata-rata lama bersekolah penduduk Indonesia masih cukup rendah. Hal ini diduga akibat adanya ketimpangan capaian pendidikan penduduk. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis data panel FEM dengan metode estimasi FGLS–SUR. Hasil penelitian menemukan bahwa ketimpangan pendidikan di Indonesia tergolong ke dalam kategori ketimpangan rendah selama 5 tahun terakhir dan dipengaruhi secara signifikan oleh kesetaraan gender, anggaran pemerintah, tingkat pengangguran, dan rasio Gini.

Kata kunci: ketimpangan pendidikan; koefisien Gini pendidikan; kesetaraan gender; FEM FGLS–SUR

Kode Klasifikasi JEL: I24; I25; J24

Pendahuluan

Pendidikan memainkan peranan penting untuk meningkatkan kemampuan suatu negara berkembang dalam menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas bagi terwujudnya pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan (Todaro, 2000). Dengan kata lain, makin banyak sumber daya manusia yang berpendidikan, maka makin mudah

bagi suatu negara untuk membangun perekonomiannya. Oleh karena itu, pembangunan pendidikan yang merata harus menjadi prioritas bagi seluruh negara.

Hak setiap warga negara Indonesia memperoleh pendidikan dijamin dalam Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 Pasal 31. Oleh karena itu, pembangunan pendidikan Indonesia direalisasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 dengan target menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang memiliki daya saing regional. Rata-rata Lama Seko-

*Alamat Korespondensi: Kantor Badan Pusat Statistik Jalan Trans Sulawesi, Desa Lalow, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow 95761. E-mail: aninditya.yuniar@bps.go.id.

lah (RLS) sebagai salah satu tolok ukur pencapaian pembangunan nasional terus meningkat tiap tahunnya, yaitu dari angka 8,32 di tahun 2015 hingga pada tahun 2019 angka RLS meningkat menjadi 8,75. Artinya, penduduk Indonesia dengan usia yang lebih dari 15 tahun, rata-rata telah menyelesaikan pendidikannya selama 9 tahun atau telah bersekolah sampai jenjang SMP/ sederajat. Hal ini menunjukkan bahwa program wajib belajar 9 tahun yang digalakkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) hampir tercapai. Meskipun terdapat peningkatan tiap tahunnya, akan tetapi nyatanya angka RLS nasional di tahun 2019 masih sangat jauh dari target program wajib belajar 12 tahun yang sudah direncanakan sejak tahun 2015.

Tujuan pembangunan pendidikan di suatu negara tidak hanya berfokus pada capaian skala nasional, tetapi juga mengurangi disparitas capaian pendidikan antarwilayah. Namun, nyatanya tujuan tersebut masih belum tercapai. Gambar 1 menunjukkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk menurut di Indonesia pada tahun 2019. Secara umum, RLS tiap provinsi masih cenderung rendah dengan RLS nasional sebesar 8,75 tahun. Rendahnya angka RLS diduga akibat adanya ketimpangan capaian pendidikan yang tinggi antarpenduduk. Hal ini mengindikasikan bahwa program wajib belajar 12 tahun masih belum diimbangi dengan pemerataan akses pendidikan di seluruh provinsi. Padahal, pembangunan pendidikan dapat menjadi investasi sumber daya manusia bagi perekonomian di masa depan sekaligus mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam perolehan pendidikan.

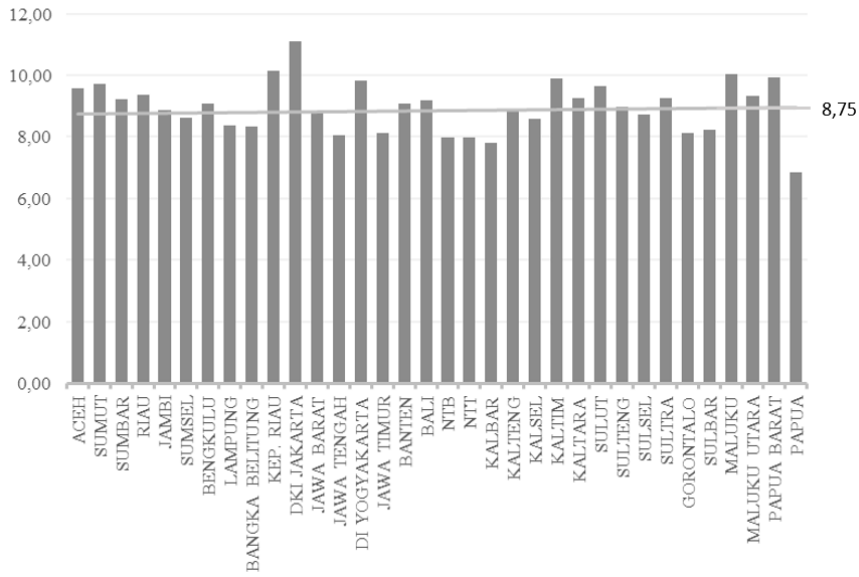
Pemerataan akses pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara tanpa memandang wilayah maupun gender. Namun, terdapat pemikiran di tengah kalangan masyarakat bahwa perempuan tidak perlu menempuh pendidikan yang tinggi karena peran utamanya adalah mengurus rumah tangga dan

anak-anaknya. Berdasarkan kultur turun-temurun, seluruh pekerjaan domestik secara mutlak merupakan pekerjaan dan tanggung jawab istri (Mufidah Ch., 2004). Laki-laki sebagai kepala keluarga yang menafkahi keluarga perlu menempuh pendidikan yang tinggi demi pekerjaan yang lebih baik. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 83,13 persen penduduk laki-laki termasuk ke dalam angkatan kerja dan sisanya merupakan bukan angkatan kerja, sedangkan persentase penduduk perempuan yang termasuk ke dalam angkatan kerja sebesar 51,89 persen dan sisanya merupakan bukan angkatan kerja. Penduduk laki-laki berumur 15 tahun ke atas yang bekerja sebesar 78,72 persen, jauh lebih besar apabila dibandingkan dengan penduduk perempuan yang hanya sebesar 49,18 persen. Sementara itu, penduduk perempuan yang hanya mengurus rumah tangga mencapai 37,04 persen.

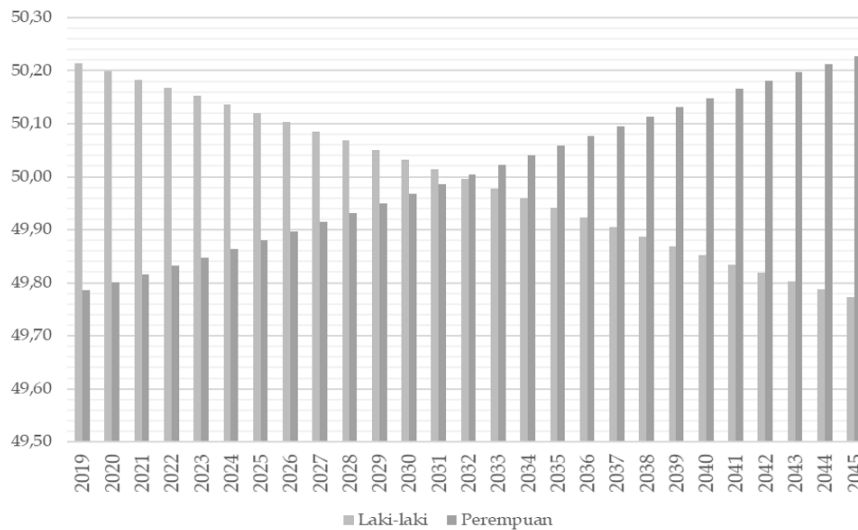
Data dari proyeksi penduduk hasil SUPAS pada Gambar 2 menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 49,73 persen penduduk perempuan atau hampir setengah dari total populasi di Indonesia pada tahun 2019. Angka ini terus meningkat tiap tahunnya hingga pada tahun 2032 dan setelahnya diproyeksikan bahwa persentase penduduk perempuan akan melebihi penduduk laki-laki di Indonesia. Maka, sangat disayangkan apabila setengah dari total populasi tersebut tidak memperoleh pendidikan yang cukup. Hal ini dapat berdampak pada kurangnya kualitas sumber daya manusia yang berperan langsung dalam perekonomian negara di masa mendatang sebagai akibat dari rendahnya investasi manusia (*human capital*) berupa pendidikan.

Thomas *et al.* (2001) menuliskan bahwa kesenjangan antargender (*gender gap*) dalam perolehan pendidikan memiliki korelasi positif dengan ketimpangan pendidikan. Korelasi tersebut makin kuat dari tahun ke tahun dan dapat disimpulkan bahwa dengan memperkecil perbedaan gender dalam pendidikan mampu menurunkan ketimpangan

Pengaruh Kesetaraan Gender terhadap Ketimpangan ...



Gambar 1. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Umur Lebih dari 15 Tahun Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2019
 Sumber: BPS Indonesia (2020), diolah



Gambar 2. Proyeksi Persentase Penduduk Laki-laki dan Perempuan di Indonesia Tahun 2019–2045
 Sumber: Publikasi *Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045 Hasil SUPAS 2015*, BPS Indonesia (2020), diolah

pendidikan. Teori tersebut didukung oleh Baloch *et al.* (2017) yang menyatakan bahwa perempuan mempunyai kesempatan yang lebih rendah untuk memperoleh pendidikan daripada laki-laki. Apabila kesempatan untuk memperoleh pendidikan antara perempuan dan laki-laki sama, maka lama

tahun bersekolah perempuan akan bertambah serta jumlah peserta didik perempuan juga meningkat. Hal ini dapat berdampak pada peningkatan rata-rata lama sekolah pada suatu wilayah dan berujung pada penurunan ketimpangan pendidikan antarwilayah.

Beberapa peneliti telah menghasilkan temuan bahwa kesetaraan gender merupakan salah satu determinan dari ketimpangan pendidikan yang sangat berpengaruh. Salah satunya adalah penelitian Thomas *et al.* (2001) yang menemukan bahwa *gender gap* yang diukur dengan perbedaan angka melek huruf antara perempuan dan laki-laki memiliki korelasi positif dengan koefisien Gini pendidikan. Korelasi ini makin kuat dari tahun ke tahun dan dapat disimpulkan bahwa dengan memperkecil perbedaan gender dalam pendidikan mampu menurunkan ketimpangan pendidikan.

Bustomi (2012) melakukan penelitian serupa pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. *Gender gap* diproksi dengan rasio angka melek huruf antara laki-laki dan perempuan serta koefisien Gini pendidikan sebagai proksi ketimpangan pendidikan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *gender gap* berpengaruh signifikan dan positif terhadap ketimpangan pendidikan.

Selain itu, Sholikhah *et al.* (2014) juga melakukan penelitian kesetaraan gender dan ketimpangan pendidikan dengan unit analisis 38 kota di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan Gini pendidikan sebagai variabel untuk menjelaskan ketimpangan pendidikan antarwilayah, sedangkan *gender gap* diukur dengan ketidaksetaraan melek huruf antara perempuan dan laki-laki. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah *gender gap* berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendidikan secara signifikan.

Penelitian terbaru dilakukan Baloch *et al.* (2017) pada 103 negara pada periode tahun 2006–2014 dengan menggunakan indeks kesetaraan gender beserta sub-indeksnya sebagai variabel bebas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks kesetaraan gender dan masing-masing empat sub-indeksnya berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendidikan.

Selain itu, faktor lain yang memengaruhi ketimpangan pendidikan adalah anggaran pemerintah

pada pendidikan. Pemerintah selaku pembuat kebijakan dan penanggung jawab atas penggunaan keuangan negara perlu mengalokasikan anggaran pada program-program yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan warga negara Indonesia. Salah satunya adalah pengalokasian anggaran pemerintah di bidang pendidikan yang perlu menjadi prioritas utama. Sebagaimana tertuang pada UUD 1945 Pasal 31 Ayat 4 bahwa anggaran untuk pendidikan harus dialokasikan sekurang-kurangnya 20 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Todaro & Smith (2011) menyatakan bahwa apabila suatu negara makin memperbanyak anggaran untuk pendidikan, maka penyediaan fasilitas pendidikan akan meningkat sehingga ketimpangan pendidikan antarwilayah akan makin menurun. Peningkatan anggaran pemerintah di bidang pendidikan mampu menurunkan ketimpangan pendidikan antarindividu, antargender, maupun antarwilayah.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengkaji masalah terkait anggaran pemerintah untuk pendidikan dan ketimpangan pendidikan. Penelitian Amin *et al.* (2019), Bustomi (2012), Hamzah *et al.* (2017), dan Sholikhah *et al.* (2014) memperoleh kesimpulan yang sama, yaitu pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan memiliki peran penting dalam menurunkan kesenjangan pendidikan antarwilayah.

Mayer (2010) menyatakan bahwa anak-anak yang dilahirkan dari keluarga kaya bersekolah lebih lama daripada anak-anak dari keluarga miskin. Pada beberapa provinsi, siswa sekolah negeri dibebaskan dari biaya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), pembelian buku, dan biaya operasional lainnya hingga jenjang menengah atas. Namun, nyatanya masih banyak provinsi di Indonesia yang masih belum menanggung biaya operasional sekolah sehingga siswa masih dibebankan biaya sekolah. Selain itu, masih ada biaya yang ditanggung

masing-masing siswa, yaitu biaya seragam, peralatan tulis, dan lain-lain. Banyaknya biaya yang dibutuhkan seorang anak untuk bersekolah berdampak pada kecenderungan anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah untuk putus sekolah. Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu indikator pembangunan ekonomi. Kondisi ketimpangan tersebut menurut Todaro & Smith (2011) merupakan akibat dari ketidakmerataan distribusi pendapatan. Wilayah dengan tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi cenderung memiliki tingkat putus sekolah yang tinggi (Kearney & Levine, 2016). Hal ini mengindikasikan bahwa penurunan ketimpangan pendapatan akan berdampak pada penurunan ketimpangan capaian pendidikan.

Penelitian terkait mengenai ketimpangan pendidikan dan pendapatan telah dilakukan. Di antaranya Coady & Dizioli (2017) dan Senadza (2011) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif yang kuat dan signifikan antara ketimpangan pendidikan dan pendapatan.

Pengangguran merupakan salah satu masalah makroekonomi yang menjadi isu di seluruh negara di dunia. Menurut Mankiw (2016), masing-masing pekerja memiliki kemampuan dan pilihan terhadap suatu pekerjaan yang berbeda-beda. Selain itu, pekerjaan-pekerjaan tertentu memerlukan keahlian khusus yang berbeda-beda dengan upah yang berbeda pula. Oleh karena itu, pencarian pekerjaan yang sesuai memerlukan waktu dan usaha yang besar sehingga menyebabkan pengangguran. Tingkat pengangguran yang tinggi menimbulkan risiko para pelajar untuk berhenti sekolah dan membuka bisnis sampingan karena ketidakpastian di pasar tenaga kerja dan lapangan pekerjaan yang langka (*The Citizen*, 2017). Selain itu, status bekerja orangtua merupakan salah satu penyebab utama ketimpangan capaian pendidikan (Maozhong & Hua, 2011). Baloch *et al.* (2017) menyatakan bahwa pengangguran menyebabkan kesulitan ekonomi pada rumah tangga sehingga orangtua memutuskan

untuk berhenti menyekolahkan anak-anak mereka. Maka, dapat disimpulkan bahwa makin tinggi tingkat pengangguran di suatu wilayah, makin timpang capaian pendidikan penduduknya.

Penelitian Baloch *et al.* (2017) menghasilkan temuan mengenai hubungan antara pengangguran dan ketimpangan pendidikan. Hasil penelitian tersebut adalah pengangguran yang diukur dengan tingkat pengangguran dapat memengaruhi ketimpangan pendidikan secara positif dan signifikan.

Penelitian ini mengadaptasi beberapa penelitian-penelitian terdahulu, tetapi menjadi penelitian pertama yang menggunakan Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebagai proksi variabel kesetaraan gender. Penelitian terkait kesetaraan gender dan ketimpangan pendidikan, khususnya di Indonesia, memproksi kesetaraan gender hanya dengan menggunakan rasio jumlah penduduk perempuan dan laki-laki yang buta huruf dan baru-baru ini indeks kesetaraan gender digunakan untuk penelitian di beberapa negara lain. Selain itu, variabel determinan ketimpangan pendidikan lain juga dimasukkan ke dalam model berdasarkan penelitian-penelitian terkait, yaitu antara lain anggaran pemerintah bidang pendidikan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran.

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh kesetaraan gender, anggaran pemerintah di bidang pendidikan, tingkat pengangguran, dan ketimpangan pendapatan terhadap ketimpangan pendidikan di Indonesia tahun 2015–2019. Ketimpangan pendidikan diproksi dengan Koefisien Gini Pendidikan (KGP) yang dihitung dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2015–2019 sehingga diperoleh angka ketimpangan pendidikan untuk masing-masing provinsi.

Metode

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data panel dari 34 provinsi di Indonesia selama tahun 2015–2019 yang diperoleh dari publikasi resmi BPS dan Kemdikbud. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Koefisien Gini Pendidikan (KGP) sebagai proksi ketimpangan pendidikan yang dihitung berdasarkan proporsi penduduk berumur 15 tahun ke atas berdasarkan pendidikan terakhir yang ditamatkan atau sedang dijalani dengan menggunakan data KOR SUSENAS Maret tahun 2015–2019. Thomas *et al.* (2001) merumuskan Gini pendidikan sebagai berikut:

$$KGP = \frac{1}{\mu} \sum_{i=2}^7 \sum_{j=1}^{i-1} P_i |y_i - y_j| P_j \quad (1)$$

dengan μ adalah rata-rata lama sekolah pada suatu provinsi, P_i dan P_j adalah proporsi populasi dengan kategori lama bersekolah tertentu, y_i dan y_j adalah lama tahun bersekolah pada jenjang pendidikan kategori ke- i dan j , dan n adalah jumlah kategori capaian sekolah, dalam penelitian ini $n = 7$ dengan sedikit modifikasi dari Senadza (2011).

Ketujuh kategori menyesuaikan dengan kebijakan wajib belajar 12 tahun di Indonesia sehingga rumus yang digunakan untuk menghitung lama sekolah pada masing-masing tujuh kategori adalah sebagai berikut:

1. Tidak bersekolah : $y_1 = 0$
2. Tidak tamat SD : $y_2 = y_1 + 0,5C_{SD} = 0,5C_{SD} = 3$
3. Tamat SD : $y_3 = y_1 + C_{SD} = C_{SD} = 6$
4. Tidak tamat SMP : $y_4 = y_3 + 0,5C_{SMP} = C_{SD} + 0,5C_{SMP} = 7,5$
5. Tamat SMP : $y_5 = y_3 + C_{SMP} = C_{SD} + C_{SMP} = 9$
6. Tidak tamat SMA : $y_6 = y_5 + 0,5C_{SMA} = C_{SD} + C_{SMP} + 0,5C_{SMA} = 10,5$
7. Tamat SMA : $y_7 = y_5 + C_{SMA} = C_{SD} + C_{SMP} + C_{SMA} = 12$

dengan y_i adalah jumlah tahun bersekolah pada tingkatan kategori ke- i (untuk $i = 1, 2, \dots, 7$), se-

dangkan C_{SD} , C_{SMP} , dan C_{SMA} merupakan jumlah tahun sekolah tamatan SD, SMP, dan SMA. Dalam penelitian ini, kategori tertinggi hanya sampai jenjang pendidikan SMA/ sederajat sehingga penduduk yang menamatkan/ sedang mengikuti pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi termasuk ke dalam kelompok penduduk yang lulus SMA/ sederajat.

KGP bernilai antara 0 sampai 1. Apabila nilai KGP makin mendekati angka 0, maka dapat disimpulkan bahwa distribusi capaian pendidikan makin merata. Sebaliknya, jika nilai KGP makin mendekati angka 1, maka distribusi capaian pendidikan makin tidak merata atau makin timpang. Penelitian ini menggolongkan nilai KGP ke dalam kategori yang juga digunakan Rahayu (2005), antara lain ketimpangan sangat rendah jika KGP kurang dari 0,2; ketimpangan rendah jika KGP di antara 0,2 sampai 0,35; ketimpangan sedang jika KGP di antara 0,36 sampai 0,49; ketimpangan tinggi jika KGP berada antara 0,5 sampai 0,7; dan ketimpangan sangat tinggi jika KGP lebih dari 0,7.

Untuk menjawab tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode analisis inferensia dengan model regresi data panel. Regresi data panel digunakan dengan tujuan untuk mengetahui dan menjelaskan variabel-variabel bebas yang memengaruhi ketimpangan pendidikan di Indonesia tahun 2015–2019.

Tahapan analisis regresi data panel antara lain: *pertama*, **Pemilihan model terbaik**. Uji Chow dilakukan untuk memilih antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM). Jika hasil keputusan dari uji Chow adalah tolak H_0 , maka kesimpulan yang diperoleh adalah model FEM lebih baik dari CEM. Pengujian selanjutnya, yaitu uji Hausman yang digunakan untuk memutuskan penggunaan model antara *Random Effect Model* (REM) dan FEM. Model FEM disimpulkan lebih baik daripada REM apabila hasil keputusan pada uji Hausman adalah tolak H_0 .

Kedua, Pengujian struktur varians-kovarians residual. Jika model yang terpilih adalah CEM atau FEM, maka pengujian struktur varians-kovarians dapat dilakukan. Struktur varians-kovarians residual digunakan untuk menguji terpenuhinya asumsi homoskedastis dan *non-cross-sectional correlation*. Oleh karena itu, diperlukan uji asumsi formal untuk menguji kedua asumsi tersebut, yaitu uji *Lagrange Multiplier* (LM) untuk pengujian heteroskedastisitas dan Uji Lambda LM (λ_{LM}) untuk pengujian *cross-sectional correlation*.

Ketiga, Pengujian asumsi klasik. Asumsi klasik yang terpenuhi dari sebuah model persamaan akan menghasilkan estimator yang bersifat *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE). Pada model yang terpilih akan dilakukan pengujian asumsi klasik dari residualnya.

Keempat, Keberartian model. Keberartian model dapat dilakukan setelah seluruh pengujian asumsi klasik sudah terpenuhi. Secara statistik, keberartian model dilakukan dengan melihat koefisien determinasi (*R-squared*), uji simultan (uji F), dan uji parsial (uji t) dari setiap variabel bebas. Selain secara statistik, keberartian model juga perlu disesuaikan dengan teori-teori yang ada.

Kelima, Interpretasi persamaan yang terpilih. Persamaan model regresi data panel dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\ln KGP_{it} = \alpha + \beta_1 IPG_{it} + \beta_2 \ln(APBDPend)_{it} + \beta_3 TPT_{it} + \beta_4 \ln(Gini)_{it} + u_{it} \quad (2)$$

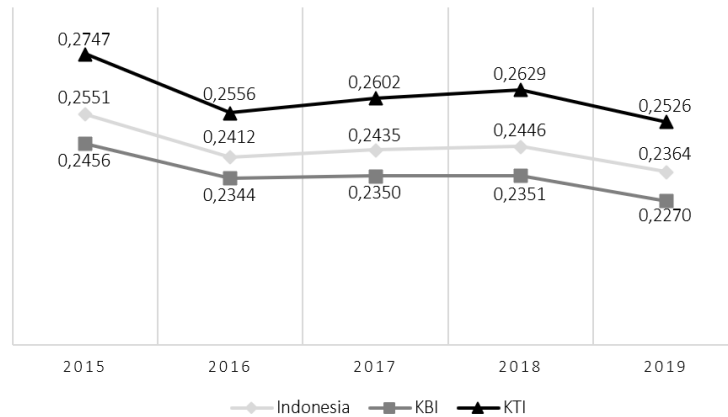
dengan *KGP* adalah Koefisien Gini Pendidikan; *IPG* adalah Indeks Pembangunan Gender; *APBDPend* adalah anggaran pemerintah daerah bidang Pendidikan; *TPT* adalah Tingkat Pengangguran Terbuka; *Gini* adalah rasio Gini; α adalah intersep; u_{it} adalah error provinsi ke-*i* tahun ke-*t*; *I* adalah provinsi ke-*i*; dan *t* adalah tahun.

Hasil dan Analisis

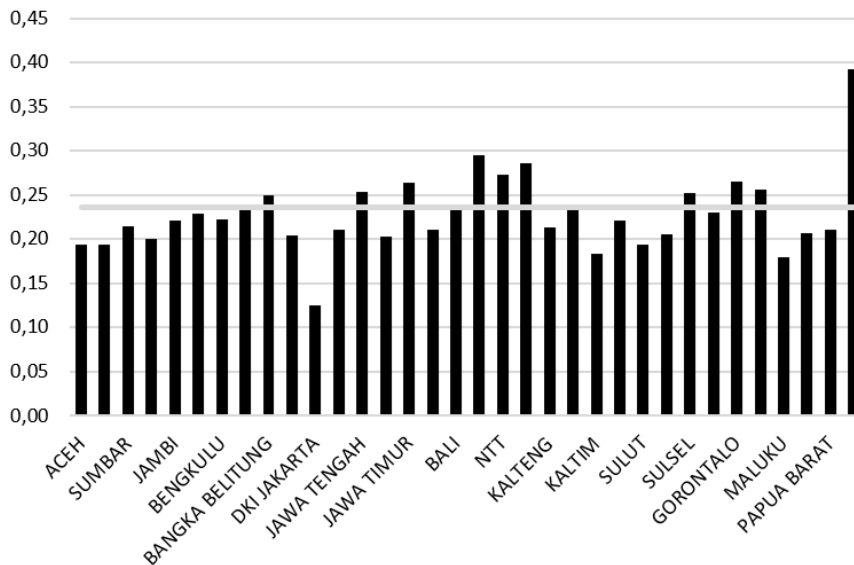
Gambaran Umum Ketimpangan Pendidikan dan Kesetaraan Gender di Indonesia

Gambar 3 menampilkan perkembangan keadaan ketimpangan pendidikan di Indonesia tahun 2015 hingga 2019 yang ditunjukkan oleh nilai Koefisien Gini Pendidikan (KGP). Secara umum, nilai KGP di Indonesia termasuk ke dalam kategori ketimpangan yang rendah. KGP nasional memiliki kecenderungan menurun dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Meskipun sempat mengalami penurunan drastis dari 0,2551 pada tahun 2015 menjadi 0,2412 pada tahun 2016, nilai KGP mengalami peningkatan kecil di 2 tahun setelahnya, yaitu menjadi 0,2435 di tahun 2017 dan 0,2446 di tahun 2018 hingga di tahun 2019 KGP mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 0,2364. Penurunan nilai KGP dari tahun 2015 ke tahun 2016 disebabkan oleh adanya peningkatan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk yang berusia 15 tahun ke atas sehingga KGP yang menggunakan RLS sebagai variabel utama penghitungannya menurun secara signifikan pada tahun 2016. Adapun peningkatan RLS merupakan pencapaian target pembangunan pendidikan pada RPJMN 2015–2019. Meskipun RLS nasional tetap meningkat tiap tahunnya, tetapi nilai KGP tahun 2017 dan 2018 justru meningkat dari tahun 2016. Peningkatan ini diduga karena adanya kesenjangan RLS antara wilayah perkotaan dan perdesaan yang lebih tinggi dari tahun 2016, yaitu meningkat sebesar 2,34 poin sehingga KGP pada tahun 2017 dan 2018 meningkat.

Wilayah timur Indonesia yang umumnya terbelakang dalam pembangunan wilayahnya, ternyata juga terbelakang dalam bidang pendidikan. Apabila dilihat dari kawasan barat dan timur Indonesia, nilai KGP untuk kedua wilayah tersebut menunjukkan adanya kesenjangan. Dari grafik pada Gambar 3 dapat disimpulkan bahwa meskipun secara



Gambar 3. Koefisien Gini Pendidikan Indonesia Tahun 2015–2019
 Sumber: SUSENAS, BPS Indonesia (2020), diolah

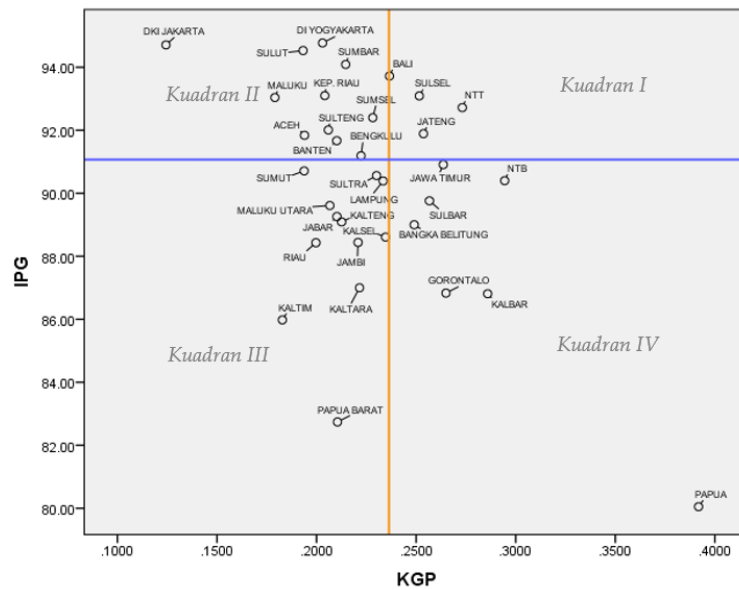


Gambar 4. Koefisien Gini Pendidikan (KGP) Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2019
 Sumber: SUSENAS, BPS Indonesia (2020), diolah

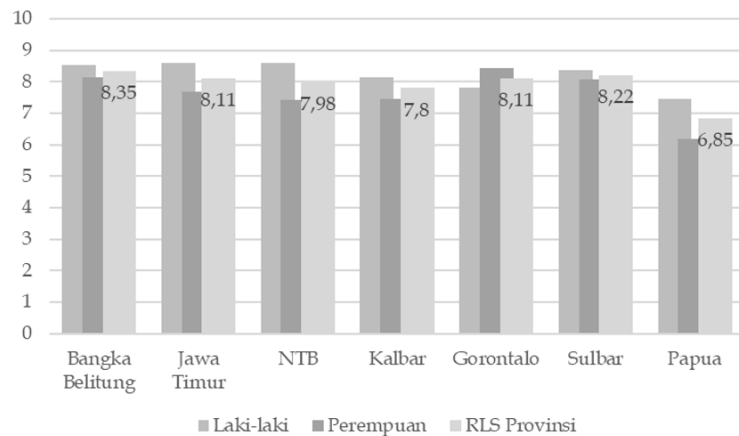
umum nilai KGP kawasan timur maupun barat cenderung mengalami penurunan tiap tahunnya, akan tetapi nyatanya KGP kawasan timur masih berada jauh di atas KGP nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa wilayah timur Indonesia masih mengalami ketimpangan pendidikan yang lebih tinggi daripada daerah bagian barat Indonesia yang diduga akibat pemerintah pusat belum memfokuskan pembangunan pendidikan untuk daerah di bagian timur

Indonesia.

Kondisi ketimpangan pendidikan pada tahun 2019 untuk seluruh provinsi ditunjukkan pada Gambar 4 dan dapat disimpulkan bahwa masih banyak provinsi yang memiliki nilai KGP yang lebih besar daripada nilai KGP nasional, yaitu sebesar 0,2364. Provinsi-provinsi tersebut antara lain Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan



Gambar 5. Analisis Kuadran Ketimpangan Pendidikan dan Kesetaraan Gender Provinsi Indonesia Tahun 2019
 Sumber: SUSENAS, BPS Indonesia (2020), diolah



Gambar 6. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin di 7 Provinsi Tahun 2019
 Sumber: SUSENAS, BPS Indonesia (2020), diolah

Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua. Menurut Rahayu (2005), KGP yang bernilai kurang dari 2 tergolong ke dalam kategori ketimpangan sangat rendah. Adapun provinsi dengan ketimpangan pendidikan yang sangat rendah antara lain Aceh, Sumatra Utara, Riau, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Maluku.

Gambar 5 menggambarkan 34 provinsi di

Indonesia yang dikelompokkan ke dalam 4 kuadran berdasarkan ketimpangan pendidikan dan kesetaraan gender. Provinsi-provinsi yang berada pada kuadran I merupakan kelompok yang ideal karena memiliki nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) lebih besar dari angka nasional dengan KGP yang lebih kecil dari angka nasional. Artinya, sebelas provinsi pada kuadran ini meru-

pakan wilayah dengan ketimpangan pendidikan yang rendah dengan kesetaraan gender yang tinggi. Adapun provinsi-provinsi yang termasuk ke dalam kuadran ini antara lain Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Bengkulu, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Banten, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Maluku.

Sebaliknya, kelompok pada kuadran IV adalah kelompok provinsi yang memiliki ketimpangan pendidikan di atas angka KGP nasional dan kesetaraan gender di atas capaian nasional. Sebanyak tujuh provinsi yang masuk ke dalam kuadran ini merupakan wilayah yang memiliki ketimpangan pendidikan tinggi yang diduga akibat dari rendahnya kesetaraan gender. Provinsi-provinsi yang termasuk ke dalam kuadran ini antara lain Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua. Provinsi-provinsi tersebut memiliki nilai ketimpangan yang lebih besar dari nilai ketimpangan nasional karena rata-rata lama sekolah (RLS) dari masing-masing provinsi tergolong rendah (Gambar 6). Selain itu, ketujuh provinsi tersebut merupakan provinsi dengan RLS terendah di Indonesia dengan Provinsi Papua yang menduduki peringkat terakhir. Trabelsi (2013) dalam penelitiannya menemukan bahwa ketimpangan pendidikan dan rata-rata lama sekolah memiliki hubungan yang negatif. Dalam arti lain, dengan menjamin masyarakat untuk bersekolah lebih lama dapat berkontribusi dalam menurunkan ketimpangan capaian pendidikan karena seluruh masyarakat berumur 15 tahun ke atas mengikuti sekolah dengan lama tahun yang hampir sama.

Di sisi lain, ketimpangan antargender nampak dari perbedaan lama sekolah antara perempuan dan laki-laki. Gambar 6 menunjukkan bahwa selain Provinsi Gorontalo, penduduk laki-laki berusia 15 tahun ke atas mengikuti sekolah jauh lebih lama dibandingkan penduduk perempuan. Padahal menurut Chaudhry & Rahman (2009), pendidikan un-

tuk perempuan sangat penting guna menurunkan kemiskinan. Perempuan yang berpendidikan tinggi dapat memperoleh pekerjaan di samping menjadi ibu rumah tangga sehingga dapat menyejahterakan rumah tangganya di bidang finansial. Selain itu, seorang ibu yang secara langsung merawat dan mendidik anak-anaknya perlu memperoleh pendidikan yang cukup agar anak-anak tersebut dapat memperoleh gizi yang baik serta mempelajari adab dan akhlak sehingga diharapkan menjadi calon sumber daya manusia yang berkualitas.

Determinan Ketimpangan Pendidikan di Indonesia

Pemilihan Model Terbaik

Pemilihan model terbaik menggunakan uji Chow menghasilkan *p-value* kurang dari alfa 0,05, yaitu sebesar 0,0000 sehingga keputusan yang diambil adalah tolak hipotesis nol. Maka, kesimpulan yang diperoleh, yaitu FEM lebih tepat digunakan dibandingkan dengan CEM. Pengujian selanjutnya yaitu uji Hausman yang menghasilkan *p-value* kurang dari alpha 0,05 yaitu sebesar 0,0000 sehingga keputusan yang diambil adalah tolak hipotesis nol. Maka kesimpulan yang diperoleh yaitu FEM menggambarkan data penelitian lebih baik daripada REM.

Pemeriksaan Struktur Varians-Kovarians Residual

Model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah model FEM sehingga perlu menentukan metode estimasi FEM berdasarkan struktur matriks varians-kovarians dari residualnya. Pengujian asumsi homoskedastis dilakukan dengan uji LM memperoleh keputusan akhir tolak hipotesis nol sehingga dapat disimpulkan bahwa struktur matriks varians-kovarians residual bersifat heteroskedastis. Sementara itu, asumsi *non cross-sectional correlation* diuji dengan Uji Lambda LM (λ_{LM}) dan diperoleh kesimpulan bahwa terdapat *cross-section correlation*

pada matriks varians-kovarians residual. Berdasarkan pengujian-pengujian tersebut, maka metode estimasi yang tepat digunakan dalam penelitian ini yaitu *Feasible Generalized Least Square-Seemingly Unrelated Regression* (FGLS-SUR).

Pengujian Asumsi Klasik

Asumsi klasik heteroskedastis dan autokolinearitas untuk model regresi data panel *fixed effect* telah diuji sebelumnya dengan uji LM dan uji Lambda LM (λ_{LM}). Maka, perlu dilakukan pengujian asumsi klasik lainnya, yaitu normalitas dan multikolinearitas. Pengujian normalitas dengan uji Jarque-Bera memperoleh keputusan gagal tolak H_0 sehingga kesimpulannya adalah residual dari model regresi berdistribusi normal. Dengan melihat nilai *Variance-Inflating Factor* (VIF) untuk seluruh variabel yang tidak lebih besar dari sepuluh, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini memenuhi asumsi non-multikolinearitas.

Model Regresi Data Panel

Tabel 1. Model Regresi Data Panel Ketimpangan Pendidikan

Variabel	Koefisien	se	<i>t-Statistic</i>
C	-0,2228	0,6562	-0,3396
IPG	-0,0135	0,0072	-1,8559*
ln(APBDPend)	-0,0215	0,0072	-2,9581**
TPT	0,0225	0,0024	9,3646**
ln(Gini)	0,0720	0,0261	2,7534**
<i>R-squared</i>	0,9887		
<i>Adj. R-Squared</i>	0,9856		
<i>F-statistic</i>	313,8211		
<i>Prob (F-stat)</i>	0,0000		
Variabel bebas: ln(KGP)			

Keterangan: * signifikan pada taraf 10%

** signifikan pada taraf 5%

Berdasarkan Tabel 1, maka estimasi persamaan regresi data panel yang terbentuk adalah sebagai

berikut:

$$\ln(\widehat{KGP}) = -0,2228 - 0,0135IPG^* - 0,0215 \ln(APBDPend)^{**} + 0,0225TPT^{**} + 0,0720 \ln(Gini)^{**} \quad (3)$$

*) signifikan pada taraf uji 10%

**) signifikan pada taraf uji 5%

Jumlah observasi: 170 (34 *cross-section* dan 5 tahun periode waktu)

Pengujian Keberartian Model

Model regresi dapat dikatakan bermakna jika model tersebut signifikan pada uji keberartian model, antara lain uji F, uji t, dan besaran nilai *R-squared*. Berdasarkan Tabel 1, hasil uji F memperoleh keputusan tolak hipotesis nol, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat minimal satu variabel bebas dalam model regresi yang terbentuk secara signifikan memengaruhi variabel ketimpangan pendidikan.

Nilai mutlak *t-statistic* pada Tabel 1 untuk variabel APBD Pendidikan, TPT, dan rasio Gini lebih besar dari nilai tabel *t* untuk alfa 5 persen ($t_{0,05;132} = 1,9781$). Dengan tingkat kepercayaan 95 persen, terdapat cukup bukti untuk menyatakan variabel APBD Pendidikan, TPT, dan rasio Gini secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel KGP. Variabel IPG memiliki nilai mutlak *t-statistic* yang lebih besar dari nilai tabel *t* untuk alfa 10 persen ($t_{0,10;132} = 1,6565$). Kesimpulan yang diperoleh adalah variabel IPG secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel KGP pada tingkat kepercayaan 90 persen.

Nilai *adjusted R-squared* yang ditunjukkan pada Tabel 1 adalah sebesar 0,9870. Maka dapat disimpulkan bahwa variasi ketimpangan pendidikan mampu dijelaskan oleh variabel IPG, anggaran bidang pendidikan, TPT, dan rasio Gini sebesar 98,7 persen, sedangkan 1,3 persen sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak tercakup da-

lam model.

Interpretasi Model

Berdasarkan hasil uji Chow dan Hausman, model regresi data panel terbaik yang terpilih adalah FEM yang bermakna bahwa walaupun terdapat perbedaan perubahan koefisien Gini pendidikan antarprovinsi, tetapi pengaruh variabel-variabel bebas yang terdapat dalam model relatif sama untuk seluruh provinsi. Hasil estimasi model pada Persamaan (3) menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas, yaitu anggaran bidang pendidikan, tingkat pengangguran terbuka, dan rasio Gini, signifikan berpengaruh secara parsial terhadap koefisien Gini pendidikan.

Kesetaraan gender yang direpresentasikan dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) berpengaruh signifikan dan negatif terhadap perubahan Koefisien Gini Pendidikan (KGP). Artinya, makin tinggi kesetaraan gender, maka ketimpangan pendidikan akan makin menurun. Persamaan (3) menunjukkan nilai koefisien regresi untuk variabel IPG adalah sebesar -0,0135 yang berarti bahwa kenaikan 1 persen IPG berpengaruh terhadap penurunan nilai KGP sebesar 0,0135 persen dengan asumsi variabel lain tetap (*ceteris paribus*). Kesimpulan tersebut sesuai dengan penelitian terkait yang dilakukan oleh Baloch *et al.* (2017), yaitu indeks kesetaraan gender berpengaruh signifikan dan negatif terhadap ketimpangan pendidikan.

Jarak (*gap*) dalam capaian kemampuan dasar antara laki-laki dan perempuan secara nasional terus menyempit yang ditandai dengan peningkatan angka IPG dimulai dari tahun 2017 hingga 2019. Meskipun demikian, angka IPG Indonesia selama periode tahun 2015–2019 masih berada jauh di bawah 100 persen yang bermakna bahwa masih terdapat kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

APBD bidang pendidikan signifikan berperan dalam menurunkan ketimpangan pendidikan

an di Indonesia. Nilai koefisien untuk variabel *APBDPend* dikali dengan 100 karena penggunaan model *log linier*. Setiap kenaikan 1 persen APBD bidang pendidikan, maka nilai KGP akan menurun sebesar 2,15 dengan asumsi variabel lain tetap (*ceteris paribus*). Kesimpulan tersebut sejalan dengan teori Todaro & Smith (2011) yang menyatakan bahwa makin besar anggaran pendidikan dalam suatu negara, maka penyediaan fasilitas pendidikan akan makin ditingkatkan sehingga ketimpangan pendidikan akan makin menurun. Selain itu, penelitian terkait yang dilakukan oleh Amin *et al.* (2019), Bustomi (2012), Hamzah *et al.* (2017), dan Sholikhah *et al.* (2014), memperoleh kesimpulan bahwa pengeluaran bidang pendidikan memberikan pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendidikan. Adapun pengeluaran tersebut lebih efektif apabila dianggarkan pada gaji pengajar maupun insentif untuk siswa daripada pengeluaran kapital seperti gedung dan peralatan (Sheehan, 2012).

Selama periode tahun 2015–2019, alokasi anggaran bidang pendidikan dengan minimal 20 persen dari total anggaran telah direalisasikan dengan harapan mampu meningkatkan kualitas serta pemerataan pelaksanaan program pendidikan di seluruh daerah di Indonesia tanpa terkecuali. Mayoritas provinsi di Indonesia sudah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan lebih dari 20 persen dari total anggaran. Namun, masih terdapat empat provinsi yang belum merealisasikan alokasi anggaran minimal untuk pendidikan. Provinsi tersebut antara lain DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Papua Barat, dan Papua.

Peningkatan jumlah pengangguran dapat meningkatkan ketimpangan pendidikan. Koefisien regresi untuk variabel tingkat pengangguran terbuka (TPT) bernilai 0,0225 yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 persen TPT akan menaikkan nilai KGP sebesar 0,0225 jika diasumsikan variabel lain tetap (*ceteris paribus*). Hasil temuan tersebut sesuai dengan

penelitian Baloch *et al.* (2017) yang menyimpulkan bahwa tingkat pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendidikan.

Tingkat pengangguran di Indonesia memiliki tren menurun dari tahun 2015 hingga 2019. Penurunan tingkat pengangguran diduga sebagai dampak dari keberhasilan target pemerintah yang mampu menciptakan sepuluh juta lapangan kerja baru bagi penduduk angkatan kerja di Indonesia. Menurut Kementerian Ketenagakerjaan, tercatat bahwa telah tercipta lapangan kerja baru sebanyak 10.340.690 orang selama tahun 2015 hingga 2018.

Ketimpangan pendapatan berkontribusi paling besar dalam meningkatkan ketimpangan capaian pendidikan di Indonesia. Berdasarkan hasil estimasi dalam Persamaan (3), variabel rasio Gini berpengaruh signifikan dan positif terhadap perubahan KGP dengan koefisien regresi yang bernilai sebesar 0,0720. Nilai koefisien tersebut dikali dengan seratus karena penggunaan model *log linier*. Dapat disimpulkan bahwa kenaikan 1 persen rasio Gini berpengaruh terhadap peningkatan nilai KGP sebesar 7,2 apabila variabel lain tetap (*ceteris paribus*). Penelitian ini menunjukkan hasil yang sejalan dengan penelitian Kearney & Levine (2016), yaitu ketimpangan pendapatan tingkat putus sekolah yang berujung pada ketimpangan pendidikan memiliki hubungan yang positif.

Ketimpangan pendapatan penduduk Indonesia yang diukur dengan nilai rasio Gini memiliki tren yang menurun dari tahun 2015 hingga 2019. Penurunan ketimpangan pendapatan penduduk Indonesia diduga akibat adanya pemerataan pendapatan. Selain itu, ketimpangan pendapatan erat kaitannya dengan angka kemiskinan. Selama periode tahun 2015–2019, jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan cenderung terus menurun tiap tahunnya. Meskipun rasio Gini mencapai titik terendah di tahun 2019, nilai tersebut masih cukup tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa masih

terdapat disparitas pada aspek ekonomi antarindividu penduduk di Indonesia.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut. *Pertama*, ketimpangan pendidikan di Indonesia tergolong ke dalam kategori rendah pada periode tahun 2015–2019. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya rata-rata lama sekolah (RLS) di Indonesia bukan disebabkan oleh adanya ketimpangan capaian pendidikan antarpenduduk secara nasional. Namun, ketimpangan pendidikan beragam untuk tiap provinsi. Aceh, Sumatra Utara, Riau, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Maluku merupakan provinsi dengan kategori ketimpangan sangat rendah, sedangkan Provinsi Papua memiliki ketimpangan sedang. Selain itu, ketimpangan pendidikan di kawasan timur Indonesia masih lebih tinggi daripada kawasan barat Indonesia.

Kedua, analisis kuadran ketimpangan pendidikan dan kesetaraan gender menunjukkan bahwa provinsi yang termasuk ke dalam kuadran IV merupakan wilayah dengan kesetaraan gender yang rendah sehingga ketimpangan pendidikan masih tinggi. Kesetaraan gender perlu ditingkatkan pada provinsi-provinsi pada kuadran ini untuk menurunkan ketimpangan capaian pendidikan di masing-masing provinsi tersebut.

Ketiga, analisis regresi data panel menghasilkan kesimpulan bahwa IPG dan anggaran pemerintah untuk pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap KGP, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan rasio Gini berpengaruh positif dan signifikan terhadap KGP. Dapat disimpulkan bahwa dengan meningkatkan kesetaraan gender dan anggaran pemerintah daerah bidang pendidikan mampu menurunkan ketimpangan pendidikan pada suatu wilayah. Sebaliknya, ketimpangan pen-

didikan di suatu wilayah dapat meningkatkan akibat tingkat pengangguran dan ketimpangan pendapatan yang meningkat.

Beberapa hal yang dapat disarankan untuk pemerintah berdasarkan simpulan penelitian antara lain membebaskan biaya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) hingga jenjang menengah atas serta pemberian insentif guna mendorong perempuan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Provinsi-provinsi yang perlu diberi perhatian khusus antara lain Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua. Selain itu, penelitian selanjutnya dengan topik berkaitan diharapkan dapat memperpanjang tahun penelitian serta mengeksplorasi variabel yang mungkin signifikan memengaruhi ketimpangan pendidikan, seperti rasio ketergantungan dan indeks kesulitan geografis. Keterbatasan penelitian ini adalah hanya mengelompokkan capaian pendidikan masyarakat hingga jenjang menengah atas, maka penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan kategori hingga jenjang perguruan tinggi. Disarankan pula menggunakan metode penelitian lain, seperti analisis regresi panel dinamis atau analisis spasial.

Daftar Pustaka

- [1] Amin, A. M., Wattimena, C. R. J., & Asani, R. N. C. P. (2019). *Ketimpangan capaian pendidikan di Indonesia tahun 2008–2017 dan determinannya tahun 2017* (Skripsi, Politeknik Statistika STIS).
- [2] Baloch, A., Noor, Z. M., Habibullah, M. S., & Bani, Y. (2017). The impact of gender equality on education inequality: A global analysis based on GMM dynamic panel estimation. *International Journal of Economics and Management*, 11(S3), 691-714.
- [3] Bustomi, M. J. (2012). Ketimpangan pendidikan antar kabupaten/kota dan implikasinya di Provinsi Jawa Tengah. *Economics Development Analysis Journal*, 1(2), 10 p. doi: <https://doi.org/10.15294/edaj.v1i2.477>.
- [4] Chaudhry, I. S., & Rahman, S. (2009). The impact of gender inequality in education on rural poverty in Pakistan: an empirical analysis. *European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences*, 15(1), 174-188.
- [5] Coady, D. & Dizioli, A. (2017). Income Inequality and education revisited: persistence, endogeneity, and heterogeneity. International Monetary Fund. *IMF Working Paper WP/17/126*. Diakses 28 Juni 2020 dari <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2017/05/26/Income-Inequality-and-Education-Revisited-Persistence-Endogeneity-and-Heterogeneity-44854>.
- [6] Hamzah, F., Rosyadi, & Kartika, M. (2017). Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, gender gap dan pendapatan per kapita terhadap ketimpangan pendidikan dan ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 6(2), 77-96. doi: <http://dx.doi.org/10.26418/jebik.v6i2.22985>.
- [7] Kearney, M. S. & Levine, P. B. (2016). Income inequality, social mobility, and the decision to drop out of high school. *Brookings Papers on Economic Activity, Economic Studies Program, The Brookings Institution*, vol. 47(1 (Spring), pp. 333-396. Diakses 28 Juni 2020 dari <https://www.brookings.edu/bpea-articles/income-inequality-social-mobility-and-the-decision-to-drop-out-of-high-school/>.
- [8] Mankiw, N. G. (2016). *Macroeconomics* (9th edition). Worth Publisher.
- [9] Maozhong, L., & Hua, S. (2011). Educational inequality analysis: international comparison. *International Journal of Business and Social Science*, 2(16), 88-93.
- [10] Mayer, S. E. (2010). The relationship between income inequality and inequality in schooling. *Theory and Research in Education*, 8(1), 5-20. doi: <https://doi.org/10.1177/1477878509356346>.
- [11] Mufidah Ch. (2004). *Paradigma gender*. Bayumedia Publishing.
- [12] Rahayu, A. (2005). Ketimpangan pendidikan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 6(1), 21-40.
- [13] Senadza, B. (2012). Education inequality in Ghana: gender and spatial dimensions. *Journal of Economic Studies*, 39(6), 724-739. doi: <https://doi.org/10.1108/01443581211274647>.
- [14] Sheehan, K. (2012). *Does gender inequality in education affect educational outcomes?* (Theses, University of Connecticut). Diakses 15 Januari 2020 dari https://opencommons.uconn.edu/srhonors_theses/251/.
- [15] Sholikhah, N., Suratman, B., Soesatyo, Y., & Soejoto, A. (2014). Analisis faktor yang memengaruhi ketimpangan pendidikan. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 20(2), 176-182.
- [16] The Citizen. (2017, September 12). *How, unemployment, affecting, education*. Diakses 29 Juni 2020 dari <https://www.thecitizen.co.tz/magazine/success/How-unemployment-is-affecting-education/1843788-4092328-12gwywj/index.html>.
- [17] Thomas, V., Wang, Y., & Fan, X. (2001). Measuring education inequality: Gini coefficients of education. *Policy Research*

Working Paper, 2525. World Bank. Diakses 30 Mei 2020 dari <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/19738>.

- [18] Todaro, M. P. (2000). *Pembangunan ekonomi di dunia ketiga*. Erlangga.
- [19] Todaro, M. P. & Smith, S.C. (2011). *Pembangunan Ekonomi* (Edisi kesebelas). Erlangga.
- [20] Trabelsi, S. (2013). Regional inequality of education in Tunisia: An evaluation by the Gini Index. *Région et Développement*, 37, 98-117.